

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Hutan dalam fungsinya sebagai penyedia pangan (*forest for food production*) diperoleh melalui pemanfaatan langsung plasma nutfah flora dan fauna untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu secara tidak langsung kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk memproduksi sumber pangan (Hasan, 2010).

Salah satu bentuk pemanfaatan secara tidak langsung adalah kegiatan *agroforestry* sebagai suatu sistem pengelolaan lahan hutan yang mengkombinasikan produksi tanaman pertanian dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat (Departemen Kehutanan, 1992).

Kegiatan *agroforestry* di kawasan hutan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kondisi hutan. Kegiatan *agroforestry* juga dilakukan sebagai kegiatan untuk rehabilitasi hutan karena sifat kegiatan *agroforestry* yang konservatif dan protektif. Manfaat-manfaat langsung yang didapat melalui *agroforestry* dapat memberikan manfaat yang bersifat jangka panjang, seperti peningkatan produktivitas tanaman, tata guna lahan yang lebih mantap dan perbaikan konservasi lingkungan. Karena itu, bila dilaksanakan dengan baik, sistem *agroforestry* dapat merupakan alat yang efektif untuk

merehabilitasi dan mengelola lahan-lahan dan menggalakkan pembangunan di pedesaan (Mayrowani dan Ashari, 2011).

Namun, keberhasilan pembangunan kehutanan melalui kegiatan *agroforestry* sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan kegiatan *agroforestry* dan upaya rehabilitasi lahan agar maju dan mandiri sebagai pelaku pembangunan kehutanan mutlak dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri sebagai pelaku pembangunan kehutanan, maka hal yang sangat penting dilaksanakan adalah membangun, memperkuat dan mengembangkan kelembagaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan (Departemen Kehutanan, 1992).

Perum Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan telah melakukan program pembangunan kehutanan dengan menyempurnakan pola pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dalam pengelolaan hutan menjadi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Prinsip PHBM adalah membuka kesempatan dan peluang kepada semua pihak untuk mengelola hutan dengan sistem berbagi (*sharing*) dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan. Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan menuntut adanya perubahan sikap, tata kerja dan struktur kelembagaan yang terkait dengan penerapan sistem PHBM. Terlebih lagi isu dan permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian hutan dan lahan masih menjadi isu dan problematik yang memerlukan penanganan tersendiri.

Fenomena kerusakan hutan dan lahan masih saja terjadi bahkan kecenderungannya meningkat. Beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi adalah karena : (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kehutanan masih rendah, banyak kegiatan yang keberhasilannya sulit dipertahankan dan (2) intervensi masyarakat terhadap lahan semakin ganas. Beberapa fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan hutan belum melembaga dalam

kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah strategi yang dilaksanakan selama ini kurang melibatkan masyarakat atau lembaga yang sudah ada dalam hal ini Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH yang telah dibentuk untuk pengelolaan hutan dianggap tidak mewakili aspirasi dari masyarakat. Sebagai lembaga yang dibentuk, LMDH belum dilibatkan dalam pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pemasarannya.

Masyarakat hanya dilibatkan apabila ada pekerjaan-pekerjaan tanaman, produksi ataupun kegiatan pemeliharaan, namun tidak dilibatkan dalam hal perencanaan pengelolaan maupun pemasaran. Demikian juga sebaliknya dalam pengelolaan kegiatan pertanian yang dilakukan di kawasan hutan (*agroforestry*), masyarakat melaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa adanya pengelolaan yang jelas mulai dari perencanaan, produksi dan pemasarannya.

Persiapan bibit tanaman, pengerjaan lahan sampai dengan pemanenan dilakukan sendiri tidak secara lembaga sehingga hasil yang diperoleh sangat bervariasi dan pemasarannya pun dilakukan secara perseorangan. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat sebagai pesanggem masih kurang karena budidaya dilakukan secara tradisional. Lembaga yang ada hanyalah program dari pengurus saja dan tidak melibatkan masyarakat. Selain lembaga masyarakat, pelaksanaan pengembangan *agroforestry* perlu mendapat dukungan kelembagaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan *agroforestry* di lahan hutan, seperti dukungan kelembagaan kredit, penyuluhan, koperasi, penelitian, dan pengembangan serta tata guna lahan.

Agar kondisi-kondisi tersebut dapat diatasi dan pembangunan hutan dengan tujuan masyarakat mandiri yang sejahtera serta perbaikan hutan dapat dicapai, perlu disiapkan strategi pengembangan kelembagaan *agroforestry* dan rehabilitasi hutan secara tepat agar bisa diperoleh peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan kondisi hutan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya *agroforestry* sebagai bisnis yang berpotensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan upaya rehabilitasi lahan
- b. Sejauhmana peran kelembagaan terhadap pengembangan *agroforestry* dalam upaya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan rehabilitasi hutan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung KPH Semarang?
- c. Strategi apa yang harus ditempuh untuk memberdayakan kelembagaan di bidang *agroforestry* dalam upaya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan rehabilitasi hutan di BKPH Tanggung KPH Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pengembangan kelembagaan di bidang *agroforestry* dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pencapaian keberhasilan rehabilitasi kawasan hutan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan *agroforestry* di BKPH Tanggung KPH Semarang belum optimal.
- b. Mengkaji tingkat pendapatan masyarakat dan upaya rehabilitasi lahan di wilayah hutan BKPH Tanggung KPH Semarang.
- c. Mengetahui sampai sejauh mana peran kelembagaan terhadap pengembangan *agroforestry* sebagai bisnis dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan rehabilitasi lahan di wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang

- d. Membuat rencana strategi pengembangan kelembagaan di bidang *agroforestry* sebagai bisnis dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan rehabilitasi lahan di BKPH Tanggung KPH Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

- a. Diperolehnya informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan *agroforestry* di BKPH Tanggung KPH Semarang belum optimal.
- b. Diperolehnya informasi terkait dengan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan upaya rehabilitasi lahan di wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang.
- c. Bagi akademisi sebagai sebagai bahan referensi penelitian sejenis dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agribisnis, kehutanan dan kelembagaan.
- d. Bagi perusahaan tempat penelitian, dapat memberikan masukan sebagai sumber informasi untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan di bidang *agroforestry* yang dapat diterapkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan.
- e. Bagi peneliti lain sebagai pustaka informasi serta referensi untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan agribisnis, kehutanan dan kelembagaan.

1.5. Hipotesis

- a. Terdapat peningkatan pendapatan masyarakat desa sekitar hutan sehingga mendukung upaya keberhasilan rehabilitasi lahan di wilayah hutan BKPH Tanggung KPH Semarang.
- b. Peran Kelembagaan *agroforestry* di BKPH Tanggung KPH Semarang berpengaruh terhadap pengembangan *agroforestry* dalam upaya

peningkatan pendapatan masyarakat dan upaya rehabilitasi lahan di wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang.

- c. Strategi pengembangan kelembagaan di bidang *agroforestry* di Wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang dapat dilakukan dengan strategi agresif .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan dan Pengelolaannya

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, secara konseptual hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan memiliki banyak manfaat terutama karena hutan merupakan paru-paru dunia (planet bumi) sehingga perlu dijaga karena jika tidak maka hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan, baik di masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa manfaat dan fungsi hutan di Indonesia sebagai berikut.

- a. Manfaat dan Fungsi Ekonomi
 - Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi.
 - Membuka lapangan pekerjaan bagi pembalok hutan legal.
 - Menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri.
- b. Manfaat dan Fungsi Klimatologis
 - Hutan dapat mengatur iklim
 - Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan.
- c. Manfaat dan Fungsi Hidrologis
 - Dapat menampung air hujan di dalam tanah
 - Mencegah intrusi air laut yang asin
 - Menjadi pengatur tata air tanah

d. Manfaat dan Fungsi Ekologis

- Mencegah erosi dan banjir
- Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah
- Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati

Penyelenggaraan kehutanan atau sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan diselenggarakan secara terpadu dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan tujuan dari penyelenggaraan kehutanan.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengelola kawasan hutan sebagai alternatif bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mencanangkan program *social forestry* sebagai upaya perbaikan kondisi hutan di Indonesia sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Salah satu bagian dari program ini adalah kegiatan *agroforestry*.

2.2 Agroforestry

2.2.1. Pengertian Agroforestry

Agroforestry merupakan manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta (Departemen Kehutanan, 1992). Dalam sistem *agroforestry* terdapat interaksi antara ekologi dan ekonomi diantara komponen-komponen yang berbeda (Van Noordwijk, *et al.* 1994)

2.2.2. Bentuk *Agroforestry*

Beberapa bentuk *agroforestry* adalah sebagai berikut (Departemen Kehutanan, 1992).

- a. *Agrisilviculture* yaitu penggunaan lahan secara sadar dan dengan pertimbangan yang matang untuk memproduksi sekaligus hasil-hasil pertanian dan kehutanan.
- b. *Sylvopastural system*, yaitu sistem pengelolaan lahan hutan untuk menghasilkan kayu dan untuk pemeliharaan ternak.
- c. *Agrosylvo-pastoral system* yaitu sistem pengelolaan lahan hutan untuk memproduksi hasil pertanian dan kehutanan secara bersamaan dan sekaligus pemeliharaan hewan ternak.
- d. *Multipurpose forest tree production systems*, yaitu sistem pengelolaan dan penanaman berbagai jenis kayu yang tidak hanya untuk hasil kayunya, akan tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan manusia ataupun pakan ternak.

2.2.3. Ciri *Agroforestry*

Beberapa ciri penting *agroforestry* (Departemen Kehutanan, 1992) adalah :

- a. *Agroforestry* biasanya tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih (tanaman dan/atau hewan), minimal satu diantaranya tumbuhan berkayu.
- b. Siklus sistem *agroforestry* selalu lebih dari satu tahun.
- c. Ada interaksi (ekonomi dan ekologi) antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu.
- d. Selalu memiliki dua macam produk atau lebih (*multi product*).
- e. Minimal mempunyai satu fungsi pelayanan jasa (*service function*), misalnya penayang, pelindung dari angin, penyubur tanah atau peneduh.
- f. Sistem *agroforestry* yang paling sederhana pun secara biologis (struktur dan fungsi) maupun ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan sistem budaya monokultur.

Menurut Ohorella (2004), *Agroforestry* memiliki beberapa keunggulan baik dari segi ekologi/lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan politik yaitu sebagai berikut.

- a. Memiliki stabilitas ekologi yang tinggi karena *agroforestry* memiliki multijenis
 - Multi jenis : memiliki keanekaragaman hayati yang lebih banyak atau memiliki rantai makanan/energi yang lebih lengkap.
 - Multi strata tajuk, dapat menciptakan iklim mikro dan konservasi tanah dan air yang lebih baik
 - Kestinambungan vegetasi, sehingga tidak pernah terjadi keterbukaan permukaan tanah yang ekstrim, yang merusak kestinambungan ekologinya
 - Penggunaan bentang lahan secara efisien
- b. Memiliki keunggulan ekonomi, yakni memberi kesejahteraan kepada petani relatif lebih tinggi dan berkesinambungan, karena *agroforestry* memiliki :
 - Tanaman yang ditanam lebih beragam, biasanya dipilih jenis-jenis tanaman yang mempunyai nilai komersial dengan potensi pasar yang besar.
 - Kebutuhan investasi yang relatif rendah, atau mungkin dapat dilakukan secara bertahap.
- c. Keunggulan sosial budaya yang berhubungan dengan kesesuaian (*adaptability*) yang tinggi dengan kondisi pengetahuan, keterampilan dan sikap budaya masyarakat petani, karena memiliki :
 - Teknologi yang fleksibel, dapat dilaksanakan dari sangat intensif untuk masyarakat yang sudah maju sampai kurang intensif untuk masyarakat yang masih tradisional dan subsisten.

- Kebutuhan input, proses pengelolaan sampai jenis *agroforestry* umumnya sudah sangat dikenal dan biasa dipergunakan oleh masyarakat setempat.
 - Filosofi budaya yang efisien, yakni memperoleh hasil yang relatif besar dengan biaya atau pengorbanan yang relatif kecil.
- d. Keunggulan politis karena dapat memenuhi hasrat politik masyarakat luas dan kepentingan bangsa secara keseluruhan, yakni :
- *Agroforestry* dapat dan sangat cocok dilakukan oleh masyarakat luas, adanya pemerataan kesempatan usaha serta menciptakan struktur *supply* yang lebih kompetitif.
 - Dapat meredakan ketegangan atau konflik politik yang memanas akibat ketimpangan peran antar golongan dan ketidakadilan ekonomi.
 - Kepercayaan yang diberikan masyarakat akan direspon dengan rasa memiliki dan menjaga sumber daya hutan/lahan yang memberi manfaat nyata kepada mereka.

Tujuan akhir program *agroforestry* adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat petani, terutama yang berada di sekitar hutan, yaitu dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak dan berlanjut dengan memeliharanya (Departemen Kehutanan, 1992; Mayrowani dan Ashari, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *agroforestry* adalah suatu sistem penggunaan lahan dengan suatu tujuan produktifitas tertentu, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Agar kegiatan *agroforestry* dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka kegiatan ini perlu dikemas dalam kerangka bisnis *agroforestry* (agribisnis).

Menurut Departemen Kehutanan (1992), pengembangan *agroforestry* harus direncanakan sejak semula, sebagai suatu bagian integral dari sistem agribisnis *agroforestry* di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dalam

sistem bisnis *agroforestry* merupakan suatu kesatuan sistem, baik sub-sistem produksi, maupun subsistem lainnya yang menyangkut pemberian *input*, proses pasca panen dan pemasaran. Di samping itu, pengembangan sistem bisnis *agroforestry* akan berjalan lancar jika ditopang oleh sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan yang sesuai.

2.3. *Agroforestry* sebagai Subsistem Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu kegiatan usaha ekonomi/bisnis yang berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang merupakan sektor usaha berbasis sumberdaya (*resource base*) (Saragih, 2010). Agribisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor bisnis pertanian, mencakup perusahaan-perusahaan pemasok input agribisnis (*upstream-side industries*), penghasil (*agricultural-producing industries*), pengolah produk agribisnis (*downstream-side industries*) dan jasa pengangkutan, jasa keuangan (*agri-supporting industries*). Sementara itu, menurut Tjakrawerdaya, 1996 dalam Said (2004), agribisnis secara umum mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi, aktivitas untuk produksi usaha tani, untuk pengolahan dan pemasaran.

Menurut Saragih (2010), agribisnis merupakan suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang terkait satu sama lain yaitu sebagai berikut.

- a. Subsistem agribisnis hulu yang mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas.
- b. Subsistem agribisnis usaha tani merupakan kegiatan yang dikenal sebagai kegiatan usaha tani, yaitu kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak dan nelayan termasuk pula kegiatan kehutanan yang mengelola input-input (lahan,

tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian.

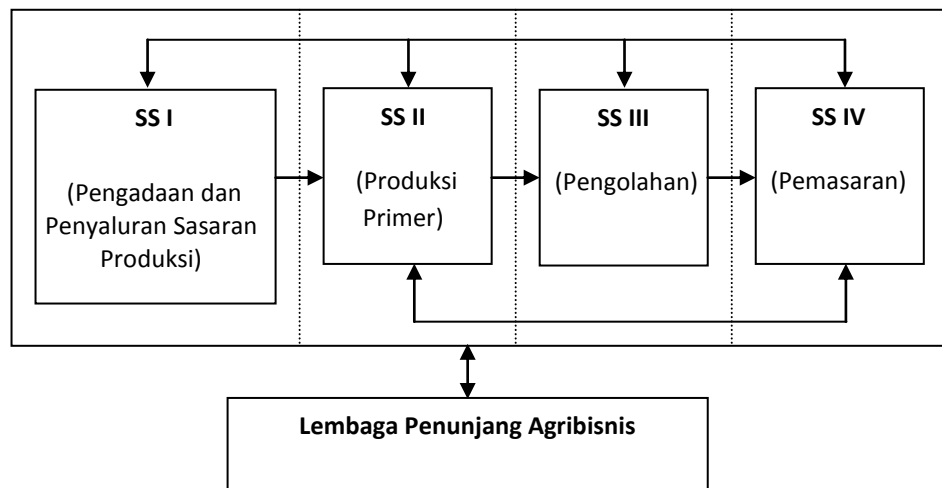
- c. Subsistem agribisnis hilir, yang sering disebut sebagai kegiatan agroindustri atau kegiatan industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku.
- d. Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*), yaitu kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti kebijakan pemerintah, perbankan, penyuluhan, pembiayaan dan lain-lain.

Usaha di bidang pertanian di Indonesia bervariasi dalam corak dan ragam. Berdasarkan segi skala usaha, ada yang berskala besar (seperti perusahaan perkebunan, industri minyak sawit, dan lain-lain), ada yang berskala menengah (seperti beberapa agroindustri menengah dan perkebunan menengah), serta ada yang berskala kecil (seperti usaha tani-usaha tani dengan luas lahan di bawah 25 hektar dan berbagai industri skala rumah tangga). Namun, apabila dikaji dari jumlah usahanya, maka usaha berskala kecil adalah yang paling banyak. Diperkirakan jumlahnya mencapai 90% dari seluruh usaha agribisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sektor agribisnis hendaknya terus dikembangkan dengan pendekatan sistem agribisnis yang berorientasi pada komersialisasi usaha atau industri pedesaan dan pertanian rakyat yang modern (Said, 2004).

Pengembangan agribisnis tidak akan efektif dan efisien bila hanya mengembangkan salah satu subsistem yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, pengembangan usaha budidaya di suatu daerah sangat berhasil dalam meningkatkan produksi dan mutu produknya, tetapi tidak berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata karena tidak disertai dengan pengembangan dan penyiapan sistem pemasarannya. Dengan demikian, produksi yang melimpah hanya akan menjadi busuk di lahan atau di tong sampah dan produsennya merasa sangat kecewa. Contoh tersebut menjadi salah satu fenomena pengembangan agribisnis yang tidak terpadu dan sering terjadi di Indonesia.

Di lain pihak, menurut Soehardjo (1997) dalam Said (2004), persyaratan-persyaratan untuk memiliki wawasan agribisnis adalah sebagai berikut.

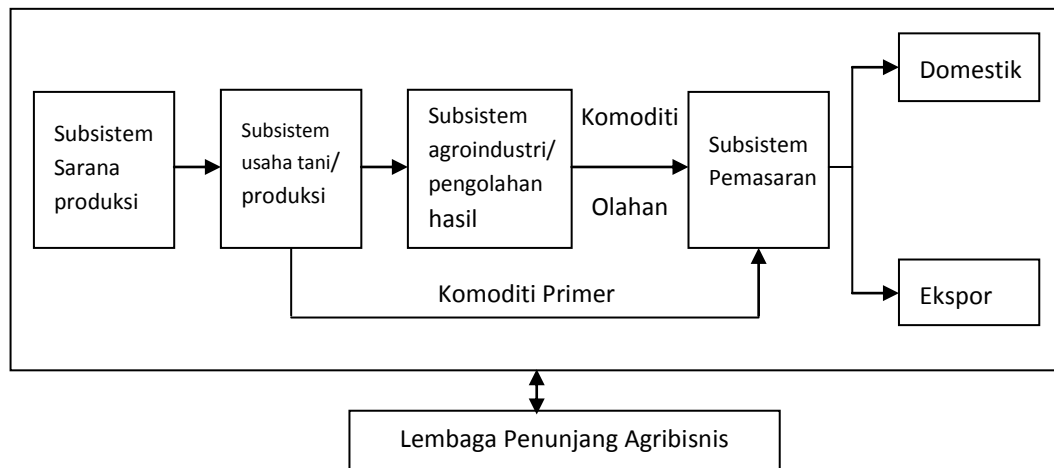
- a. Memandang agribisnis sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa subsistem. Sistem tersebut akan berfungsi baik apabila tidak ada gangguan pada salah satu subsistem (Gambar 2). Pengembangan agribisnis harus mengembangkan semua subsistem di dalamnya karena tidak ada satu subsistem yang lebih penting dari subsistem lainnya.
- b. Setiap subsistem dalam sistem agribisnis mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan. Tanda panah ke belakang ke kiri pada subsistem pengolahan (SS-III) menunjukkan bahwa SS-III akan berfungsi dengan baik apabila ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang dihasilkan oleh SS-II. Tanda panah ke depan (ke kanan) pada SS-III menunjukkan bahwa subsistem pengolahan (SS-III) akan berhasil dengan baik jika menemukan pasar untuk produksinya (Gambar 1).



Gambar 1. Sistem Agribisnis dan Lembaga Penunjangnya
Sumber : Soehardjo (1997) dalam Said (2004)

- c. Agribisnis memerlukan lembaga penunjang, seperti lembaga pertanahan, pembiayaan/ keuangan, pendidikan, penelitian, dan perhubungan. Lembaga pendidikan dan pelatihan mempersiapkan para pelaku agribisnis yang profesional, sedangkan lembaga penelitian memberikan sumbangan berupa teknologi dan informasi. Lembaga-lembaga penunjang kebanyakan berada di luar sektor pertanian, sehingga sektor pertanian semakin erat terkait dengan sektor lainnya. Dengan demikian akan semakin besar sumbangan yang dapat diberikan sektor agribisnis terhadap ekonomi nasional. Di samping memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), agribisnis juga berperan sebagai penyedia bahan kebutuhan hidup (pangan, perumahan, dan pakaian), penghasil devisa, pencipta lapangan kerja, dan sumber peningkatan pendapatan masyarakat.
- d. Agribisnis melibatkan pelaku dari berbagai pihak (BUMN), swasta, dan koperasi) dengan profesi sebagai penghasil produk primer, pengolah, pedagang, distributor, importir, eksportir, dan lain-lain. Kualitas sumber daya manusia di atas sangat menentukan berfungsinya subsistem-subsistem dalam sistem agribisnis dan dalam memelihara kelancaran arus komoditas dari produsen ke konsumen. Petani kecil adalah salah satu pelaku dalam agribisnis, sehingga merupakan kekeliruan besar apabila tidak memberikan perhatian dan tidak mengikutsertakan mereka, yang pada saat ini jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 18 juta rumah tangga.

Menurut Soedijanto, 1993 dalam Saragih (2001), agribisnis sebagai semua kegiatan di sektor pertanian dimulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran, sehingga produk tersebut sampai ke konsumen. Secara diagramatik mata rantai agribisnis dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 2).



Gambar 2. Mata Rantai Penunjang Agribisnis
Sumber : Saragih, 2001

Cakupan sistem agribisnis secara lengkap menurut Saragih (2001) adalah : (1) subsistem pengadaan sapronak (*input factors*); (2) subsistem budidaya (*production*); (3) subsistem pengolahan hasil (*processing*); (4) subsistem pemasaran (*marketing*), dan (5) subsistem kelembagaan (*supporting institution*).

Menurut Saragih (2001) yang dikutip oleh Suryanto (2004) bahwa Pembangunan agribisnis ternak ruminansia dengan menggunakan pendekatan sistem agribisnis dapat dikelompokkan menjadi 4 sistem yaitu sebagai berikut.

1. Subsistem agribisnis hulu (*upstream off-farm agribusiness*), mencakup kegiatan ekonomi industri yang menghasilkan sarana produksi seperti pembibitan ternak, usaha industri pakan, industri obat-obatan, industri insiminasi buatan dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.
2. Subsistem agribisnis budidaya usaha tani ternak (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang selama ini disebut budidaya usaha tani ternak yang menggunakan sarana produksi usaha tani untuk menghasilkan produksi ternak primer (*farm-product*).
3. Subsistem agribisnis hilir (*downstream off-farm agribusiness*) yaitu kegiatan industri agro yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan

dan memperdagangkan hasil olahan ternak. Dalam subsistem ini termasuk industri pemotongan ternak, industri pengolahan/ pengalengan daging, industri pengawetan kulit, industri penyamaan kulit, industri sepatu, industri pengolahan susu dan lain-lain beserta perdagangannya di dalam negeri maupun ekspor.

4. Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa dalam agribisnis ternak seperti perbankan transportasi, penyuluhan, peskesnak, holding ground, kebijakan pemerintah (Ditjen Produksi Peternakan), Lembaga Pendidikan dan Penelitian dan lain-lain.

Kegiatan agribisnis ternak tersebut, di tingkat peternakan rakyat sebagian besar masih terpisah-pisah, belum terkait secara utuh dalam satu sistem. Agribisnis yang hanya pada kegiatan subsistem budidaya usaha tani ternak ruminansia yang dilakukan petani ternak, sulit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena nilai tambah yang terbesar berada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir (Saragih, 2000; Suryanto, 2004).

Secara ringkas dinyatakan bahwa sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertikal antara beberapa subsistem bisnis dalam satu sistem komoditas (Saragih, 2010). Kegiatan *agroforestry* dapat digolongkan sebagai agribisnis karena untuk mengembangkan suatu sistem *agroforestry* ditempuh pendekatan usaha tani (*farming system*). Dengan model usaha tani ini, keputusan petani dalam memilih teknologi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan alam dan sosial ekonomi (Departemen Kehutanan, 1992). Lingkungan alam terdiri dari keadaan tanah, topografi, kondisi-kondisi biologi (hama dan penyakit, fisiologi tanaman), curah hujan dan kelembaban.

Kondisi sosial ekonomi dapat bersifat eksternal dan internal antara lain berupa tujuan usaha tani dan sumberdaya, kendala-kendala mengenai lahan, tenaga kerja dan modal kerja serta pasar input dan output, kelembagaan, infrastruktur dan fasilitas yang kesemuanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan

nasional. Dalam pelaksanaannya, kegiatan *agroforestry* melibatkan sumberdaya alam dengan komponen-komponennya (air, tanah, hutan dan sumberdaya manusia) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti faktor-faktor iklim, sosial ekonomi, politik, budaya dan biofisik. Pelaksanaan *agroforestry* direncanakan sejak awal sebagai suatu bagian integral dari sistem bisnis *agroforestry* di daerah yang bersangkutan. Sistem bisnis *agroforestry* meliputi subsistem produksi, pemberian input, proses pasca panen dan pemasaran (Departemen Kehutanan, 1992). Disamping itu, pengembangan sistem bisnis *agroforestry* akan berjalan lancar apabila ditopang oleh sistem sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan yang sesuai.

Pengembangan *agroforestry* harus merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan regional dengan tujuan mengurangi penggundulan hutan, konservasi flora dan fauna dan plasma nutfah, mengurangi erosi tanah dan menumbuhkan peningkatan produktivitas tanah yang stabil dan berkesinambungan. Bila sasaran-sasaran ini tercapai, maka diharapkan kesejahteraan rakyat di dalam dan di sekitar hutan akan meningkat.

2.4. Kelembagaan

2.4.1. Pengertian

Menurut beberapa ahli, konsep kelembagaan adalah sebagai berikut (dalam Departemen Kehutanan, 1992) :

- Aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
- Aturan dan rambu-rambu sebagai panutan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain.

- Aturan main di dalam kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. Departemen Kehutanan (1992) membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.
- Suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.
- Merangkum dari berbagai pengertian tentang kelembagaan, Djogo, *et al* (2003) mengemukakan bahwa kelembagaan adalah “suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Secara sederhana, suatu hubungan sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu : (Syahyuti, 2003)

- a. Komponen *person*, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- b. Komponen kepentingan yaitu orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- c. Komponen aturan dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

- d. Komponen struktur dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

2.4.2. Peran Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia. Banyak masalah-masalah pertanian dan kehutanan yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga. Sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dipayungi oleh suatu kelembagaan merupakan faktor penggerak sebagai satu kesatuan sistem dalam pembangunan pertanian dan kehutanan (Yohanes, *et al.* 2004).

Kelembagaan dalam hal ini bukan hanya menyangkut kelembagaan usaha tani, tetapi juga peranan kelembagaan-kelembagaan penunjang dalam pengembangan pertanian yang dapat mendukung pembangunan dan usaha agribisnis. Lebih jauh lagi pentingnya lembaga di pedesaan dalam pembangunan pertanian dan kehutanan diuraikan sbb. (Yohanes, *et al.* 2004)

- a. Banyak masalah-masalah pertanian hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga.
- b. Suatu organisasi atau lembaga dapat memberi kontribusi pada usaha-usaha pertanian terkait dengan penyebaran dan pengembangan teknologi. Dalam jangka panjang, kemampuan masyarakat petani untuk bekerjasama, sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan teknis.
- c. Pada suatu masyarakat desa yang akan bersaing dengan dunia luar, mereka perlu terorganisasi. Lembaga-lembaga tingkat desa dapat menyediakan pengalaman dalam keterampilan yang harus dipelajari agar dapat mengorganisasikan diri.

Peran Kelembagaan membuat orang atau anggota masyarakat saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumberdaya alam yang didukung oleh

peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi.

2.4.3. Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 24 tahun 2001 maupun SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) maka sistem PHBM adalah pengelolaan hutan yang dapat menyelamatkan sumberdaya hutan dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Pelaksanaan PHBM dilakukan dengan prinsip : keterbukaan, kebersamaan, keadilan, demokratis, pembelajaran bersama dan saling memahami; diselenggarakan dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan prosedur yang sederhana serta kerjasama dilakukan antar lembaga.

Masyarakat sekitar hutan yang dimaksudkan memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan masyarakat desa hutan (LMDH). Peran masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam LMDH terhadap pengelolaan sumber daya hutan menuju masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari adalah sebagai berikut.

- a. Bersama-sama pihak pengelola hutan dan *stakeholder* bertanggungjawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- b. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* meningkatkan peran dan akses terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan lestari
- d. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* menerapkan perencanaan partisipatif.

- e. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* menanggung biaya untuk melaksanakan proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Selain LMDH, dalam sistem PHBM masih banyak terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan atau sering disebut dengan *stakeholder* (pihak terkait), yaitu Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, dll. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) sebagai berikut. (Perum Perhutani, 2007)

- a. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara, bersama-sama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan berperan dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan melalui pengelolaan sumber daya hutan dengan model kemitraan.
- b. LMDH mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan dan berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- c. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dalam pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi : Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Masing-masing Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemberdayaan secara intensif terhadap masyarakat yang terlibat dalam PHBM melalui pendekatan kelompok (Pemprov Jawa Tengah. 2001)
- d. Lembaga swadaya masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada

masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat

- e. Lembaga ekonomi masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
- f. Usaha swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- g. Lembaga donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan lembaga donor akan menjadikan masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Dalam kegiatan *agroforestry*, keberhasilan pengembangannya sebagian ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk memberikan *input* dalam jumlah yang memadai pada waktu yang tepat dan fasilitas-fasilitas untuk pasar *output* (Departemen Kehutanan, 1992).

Pengembangan *agroforestry* memerlukan dukungan berbagai macam kelembagaan. Keberhasilan upaya *agroforestry* akan meningkat apabila diintegrasikan dengan sistem pengembangan bisnis *agroforestry*. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pasar untuk *input* dan *output*. Selain itu, bisnis *agroforestry* melibatkan kelembagaan lain seperti kredit, penyuluhan, koperasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan tata guna lahan yang mantap. Kelembagaan-kelembagaan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan *agroforestry* antara lain : (1) koordinasi antar lembaga; (2) masalah pendanaan dan infrastruktur; (3) masalah kelembagaan pada tingkat lokal dan (4) distribusi keuntungan (Departemen Kehutanan, 1992).

2.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan Kelembagaan berarti meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian kelembagaan (Rianto, 2006). Dalam kerangka pembangunan di bidang *agroforestry*, upaya pemberdayaan kelembagaan dapat dilihat sbb.

- a. Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan masyarakat yang diwadahi dalam suatu lembaga di bidang *agroforestry* berkembang.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat yang diwadahi lembaga dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah.
- c. Melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat desa hutan merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas masyarakat desa hutan mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki (Perum Perhutani. 2009).

2.6. Pendapatan, Biaya Produksi dan Penerimaan Usaha Tani

2.6.1. Penerimaan

Penerimaan tunai usaha tani (*farm receipt*) adalah sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha tani. Pendapatan kotor usaha tani (*gross farm income*) merupakan nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Jangka waktu pembukuan umumnya setahun dan mencakup semua produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan dalam usaha tani untuk bibit atau makanan ternak,

digunakan untuk pembayaran dan disimpan atau ada di gudang pada akhir tahun (Soekartawi, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$TR = Y.Py$$

Keterangan

- TR : Total penerimaan
 Y : Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tani
 Py : Harga y

Menurut Soekartawi (2006) dan Suratiyah (2008), Pendapatan kotor atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari usaha tani selama satu periode diperhitungkan dari hasil penjualan atau penaksiran kembali (Rp). Rumus pendapatan kotor sebagai berikut .

Pendapatan kotor = Jumlah produksi x Harga per kesatuan

$$(R) \qquad (Y) \qquad x \qquad (Py)$$

Lebih lanjut dikatakan bahwa penerimaan atau nilai produksi (R atau S) yaitu jumlah produksi dikalikan dengan harga produksi dalam satuan rupiah. Penerimaan merupakan nilai hasil produksi dari seluruh korbanan yang dikeluarkan selama periode tertentu (Gusasi dan Saade, 2006). Suryanto (2004) menyatakan bahwa penerimaan usaha tani ternak dihitung berdasarkan penjualan hasil usaha secara riil dan penjualan yang diperhitungkan.

2.6.2. Biaya Produksi

Biaya usaha tani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usaha tani. Biaya usaha tani diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

a) Biaya tetap (*fixed cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contoh : sewa tanah, pajak, alat pertanian, dan iuran irigasi.

b) Biaya tidak tetap (*variabel cost*)

Biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, contohnya sarana produksi (Soekartawi, 2006). Menurut Soekartawi (2006) dan Suratiyah (2008), biaya ($C = Cost$) dapat dibedakan menjadi biaya tetap ($FC = Fixed Cost$), yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi (y), dan biaya variabel ($VC = Variabel Cost$) yaitu biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi.

Pengeluaran tunai usaha tani (*farm payment*) adalah sebagai jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usaha tani. Pengeluaran total usaha tani (*total farm expenses*) merupakan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pengeluaran tidak tetap (*Variable cost* atau *direct cost*) adalah pengeluaran yang digunakan untuk produksi, dimana besar kecilnya mengalami perubahan sebanding dengan besarnya produksi, 2) pengeluaran tetap (*fixed cost*) ialah pengeluaran usaha tani yang tidak tergantung kepada besarnya produksi. Biaya usaha adalah seluruh korbanan yang dikeluarkan sebagai biaya untuk memperoleh hasil selama periode usaha tertentu (Gusasi dan Saade, 2006). Biaya produksi dapat dibagi menjadi biaya tetap dan variabel (Suryanto, 2004). Mankiw (2003) menyatakan bahwa biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak berubah dengan besarnya output yang diproduksi, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan *output* yang

dihasilkan. Lebih lanjut Suryanto (2004) menyatakan bahwa biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk kegiatan usaha produksi.

2.6.3. Pendapatan

Pendapatan (*revenue*) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Harahap (2001) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima. Secara umum pendapatan petani pada usaha tani tanaman pangan tergolong rendah. Pendapatan dalam usaha tani merupakan selisih antara penerimaan total dan biaya-biaya.

Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti (sewa, bunga, dan deviden) serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.

Menurut Soekartawi (2006), keuntungan atau *profit* adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang dari penjualan produk barang maupun produk jasa yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membiayai produk barang maupun produk jasa tersebut. Pendapatan tunai usaha tani (*farm net cash flow*) adalah selisih antara penerimaan tunai usaha tani dan pengeluaran tunai

usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Rumus pendapatan usaha tani :

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan :

Pd : Pendapatan usaha tani

TR : Total Penerimaan

TC : Total Biaya

Pendapatan dapat dibagi menjadi 3 pendapatan yaitu sebagai berikut.

1. Pendapatan kotor (*Gross income*) adalah pendapatan usaha tani yang belum dikurangi biaya-biaya.
2. Pendapatan bersih (*Net income*) adalah pendapatan setelah dikurangi biaya.
3. Pendapatan pengelola (*Management income*) adalah pendapatan merupakan hasil pengurangan dari total output dengan total input.

Pendapatan dihitung dengan cara menghitung total penerimaan usaha dikurangi dengan total biaya ternak selama satu tahun Mankiw (2003); Suharyanto, *et al* (2004); Mandaka dan Hutagaol (2005); (Gusasi dan Saade, 2006), dan Hidayat (2007) menyatakan bahwa pendapatan usaha merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya selama kurun waktu tertentu. Analisis usaha sapi perah diperlukan untuk mengetahui pendapatan yang diterima dari seluruh korbanan yang dikeluarkan peternak (Hidayat, 2007).

Peningkatan pendapatan usaha dapat dilakukan dengan cara meningkatkan skala usaha seperti peningkatan jumlah ternak, peningkatan luas lahan, penggunaan pakan dari lahan sendiri secara intensif dan penggunaan pupuk kandang (Hidayat, 2007). Hal tersebut sesuai dengan Mankiw (2003) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh ditentukan oleh:

modal fisik, jika pekerja bekerja dengan peralatan atau struktur yang lebih modern dan lengkap, maka output yang diproduksi akan lebih baik; modal manusia, jika pekerja lebih terdidik, produksinya akan lebih tinggi; dan pengetahuan teknologis, jika pekerja memiliki akses ke teknologi yang lebih canggih, maka produksi yang dihasilkan akan lebih tinggi. Produksi yang tinggi memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan.

Pendapatan usaha tani adalah besarnya manfaat atau hasil yang diterima oleh petani yang dihitung berdasarkan dari nilai produksi dikurangi semua jenis pengeluaran yang digunakan untuk produksi. Untuk itu pendapatan usaha tani sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya sarana produksi, biaya pemeliharaan, biaya pasca panen, pengolahan dan distribusi serta nilai produksi (Soekartawi, 2006). Menurut Mandaka dan Hutagaol (2005) bahwa pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya selama kurun waktu tertentu.

2.7. SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Menurut Rangkuti (2009), analisis SWOT dilakukan dengan cara menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dipunyai dan dengan peluang dan ancaman yang harus dihadapi, maka suatu organisasi dapat menentukan strategi agar dengan kondisi yang ada tetap dapat bergerak maju. Selanjutnya langkah-langkah yang digunakan dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut.

1. Penentuan faktor strategi internal yang termasuk faktor internal kekuatan dan kelemahan.
2. Penentuan faktor strategi eksternal yang termasuk faktor eksternal peluang dan ancaman.
3. Perumusan strategi alternatif dengan menyusun matriks SWOT, matriks internal dan spesifikasi matriks.

Analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga setelah diperoleh data, akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT ini.

David (2003) menyatakan bahwa analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh para pengguna analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, bagus untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. Analisis ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu sebagai berikut.

1. **Strength (S)**, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
2. **Weakness (W)**, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.
3. **Opportunity (O)**, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
4. **Threat (T)**, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

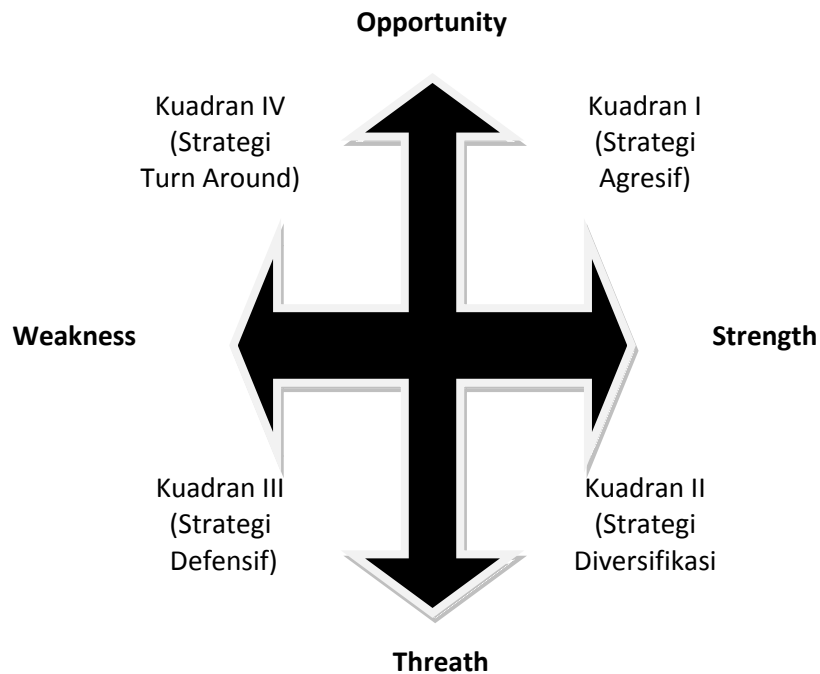
Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metoda analisis yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan rekomendasi untuk

mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

Untuk membantu membedakan apakah suatu hal digolongkan ke dalam kekuatan ataukah peluang bisa dilakukan dengan cara melihat asal dari suatu hal tersebut. Hal penting yang harus diingat selama menggunakan analisis SWOT adalah semua yang dituliskan haruslah jujur dan berdasarkan fakta (David, 2003). Berikut ini dijelaskan tambahan hal-hal yang biasanya menjadi:

- Kekuatan, knowledge atau kepakaran yang dimiliki, produk baru atau pelayanan yang unik, lokasi tempat perusahaan berada dan kualitas produk atau proses.
- Kelemahan, kurangnya pengetahuan marketing, produk yang tidak dapat dibedakan dengan produk kompetitor, lokasi perusahaan yang terpencil, kualitas produk yang jelek, reputasi yang buruk.
- Peluang, pasar yang berkembang, penggabungan 2 – 3 perusahaan atau aliansi segmen pasar yang baru, pasar internasional, pasar yang luang karena kompetitor yang tidak sanggup memenuhi permintaan customer.
- Ancaman, kompetitor baru di area yang sama, persaingan harga dengan kompetitor, kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif, kompetitor memegang pangsa pasar terbesar, dikenalkannya pajak penjualan.

Skema dari analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Skema dari analisis SWOT
Sumber : Rangkuti,2009

Kuadran I : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Suatu usaha memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Kuadran II : merupakan situasi dimana suatu usaha, meskipun menghadapi berbagai ancaman, usaha ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran III : menandakan sebuah organisasi yang lemah (menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal) namun sangat berpeluang. Fokus strategi usaha ini adalah meminimalkan masalah-masalah

internal organisasi sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Strategi yang diterapkan adalah ubah strategi, artinya suatu usaha atau organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, sebab strategi yang lam dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran IV : menandakan sebuah organisasi atau usaha yang lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan dengan mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

2.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan *agroforestry* dan dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Referensi Penelitian Terdahulu

Nama	Perguruan /Lembaga	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Sadikin, I, <i>et al</i>	Balitbang Bogor	1999	Kajian Kelembagaan Agribisnis Dalam Mendukung Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berbasis Agroekosistem	kelembagaan yang mampu tumbuh dan berkembang adalah kelembagaan komersial lokal yang berfungsi ganda.

Yohanes, <i>et al</i>	BPTP Lombok	2004	Daya Dukung Kelembagaan Dalam Pengembangan Teknologi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Lombok Timur	kelembagaan penunjang pedesaan relatif kurang dalam mendukung pembangunan dan usaha agribisnis pertanian. Keberadaan lembaga penyuluhan, lembaga produksi dan sumber daya manusia yang relatif rendah dan statis dan menyebabkan penerapan teknologi relatif terbatas. Penyebaran teknologi pertanian lahan kering belum disesuaikan dengan kebutuhan petani.
Indraningsih, KS, <i>et al</i>	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2005	Strategi Pengembangan Model Kemitraan agribisnis Holtikultura di Bali	Untuk memenuhi permintaan pasar dan preferensi konsumen, permasalahan efisiensi, produktivitas, dan kualitas harus mendapatkan perhatian. Salah satu solusinya adalah dengan membangun kelembagaan kemitraan usaha yang saling saling menguntungkan serta menerapkan manajemen mutu yang andal
Sayaka, B, <i>et al</i>	Departemen Pertanian	2008	Pengembangan Kelembagaan <i>Partnership</i> Dalam Pemasaran Komoditas Pertanian	Faktor pendukung kemitraan (<i>partnership</i>) sangat berpengaruh terhadap pemasaran berbagai komoditas pertanian
Suradisastra, K.	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2008	Strategi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani	Proses pengambilan keputusan dalam masyarakat petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk upaya diseminasi teknologi. Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi tekno-

				<p>sosial komunitas petani. Keberhasilan suatu program pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan.</p>
Zakaria, W.A.	Fakultas Pertanian Universitas Lampung	2009	Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani	<p>Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani merupakan adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal dalam bingkai aturan main yang ada untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Daya saing produk pertanian di tingkat lokal (daya saing lokal) yang dihasilkan melalui pemberdayaan kelembagaan/organisasi ekonomi petani pada masing-masing lokasi akan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing petani dan daya saing wilayah yang pada akhirnya akan membentuk daya saing bangsa.</p>
Suhirin	Program Magister Agribisnis Universitas Diponegoro	2011	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Mendukung Pelestarian Hutan (Studi Kasus LMDH Wonoharjo) di Kabupaten Kendal	<p>Dengan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sistem PHBM terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam PHBM adalah peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan</p>

Mayrowani, H. dan Ashari	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2011	Pengembangan <i>Agroforestry</i> untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan	Manfaat yang diperoleh dari <i>agroforestry</i> adalah meningkatnya produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan kualitas gizi masyarakat bagi kesejahteraan di sekitar hutan. Untuk mengintegrasikan kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat dikembangkan konsep hutan kemasyarakatan atau PHBM yang merupakan fasilitasi LMDH. Perkembangan realisasi <i>agroforestry</i> menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. <i>Agroforestry</i> yang pada umumnya melibatkan LMDH mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.
--------------------------------	---	------	---	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, beberapa hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- dilakukan untuk bidang pertanian dan kehutanan
- dilakukan dalam satu wilayah kawasan hutan (BKPH) beserta kelembagaan yang terlibat di dalamnya
- dilakukan untuk melihat pengaruh kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan *agroforestry* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan upaya rehabilitasi lahan yang dilakukan di kawasan hutan untuk mencari strategi pengembangan kelembagaannya.

2.9. Kerangka Pemikiran Teoretis

Hutan memiliki fungsi penting dalam kehidupan, selain memberikan fungsi ekonomi, hutan juga memberikan fungsi keindahan dan fungsi

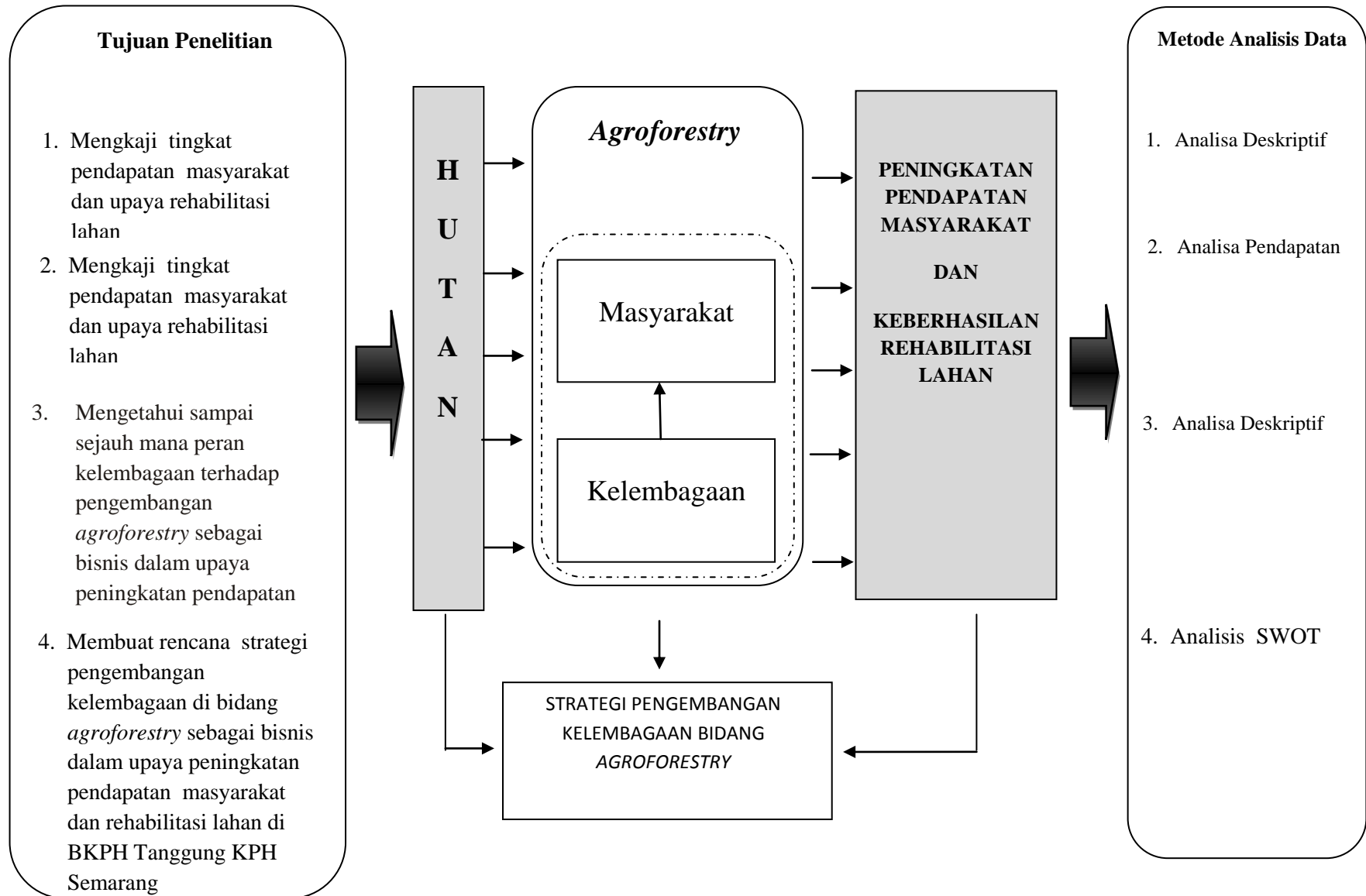
perlindungan bagi lingkungan. Dalam rangka pemanfaatan hutan untuk mencapai tujuan peningkatan penghasilan masyarakat dan rehabilitasi lahan dilakukan sistem *agroforestry* di lahan hutan.

Keberhasilan pembangunan kehutanan melalui *agroforestry* ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya.

Kelembagaan merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan sumberdaya manusia maupun pengembangan faktor fisik usaha di bidang *agroforestry* dan sistem bisnis *agroforestry* agar tujuan pelaksanaan *agroforestry* dalam peningkatan dan pelestarian sumberdaya pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.

Pengembangan *agroforestry* di BKPH Tanggung KPH Semarang memerlukan dukungan berbagai macam kelembagaan baik kelembagaan untuk input dan output maupun koordinasi antar lembaga, pemberdayaan kelembagaan pada tingkat lokal dan distribusi. Kelembagaan yang ada di wilayah BKPH Tanggung seperti Perum Perhutani, LMDH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian maupun pihak swasta yang menanamkan modal seperti PT Indo Fatah Rizki Mulia sangat berpengaruh terhadap pengembangan *agroforestry* di wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang.

Strategi pengembangan kelembagaan di bidang *agroforestry* di wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang diperlukan agar dukungan terhadap kegiatan *agroforestry* bisa optimal. Kerangka Pemikiran Pemberdayaan Kelembagaan dalam Bidang *Agroforestry* di atas dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Strategi Pemberdayaan Kelembagaan dalam Bidang *Agroforestry*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian strategi pengembangan kelembagaan bidang *agroforestry* di wilayah hutan BKPH Tanggung KPH Semarang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan untuk pengembangan kelembagaan *agroforestry* dalam upaya melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Lokasi dan Sasaran Penelitian

3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian di wilayah hutan BKPH Tanggung KPH Semarang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan bahwa (i) BKPH Tanggung merupakan wilayah KPH Semarang dengan kegiatan rehabilitasi lahan dan kegiatan *agroforestry* yang cukup luas; (ii) Terdapat kelembagaan desa hutan (LMDH) yang sudah dibentuk sebanyak 8 LMDH (Jati Makmur, Rejo Rahayu, Sido Makmur, Tani Maju, Waringin Makmur, Rejo Rahayu Kapung, Wargo Manunggal dan Jati Agung dan (iii) meliputi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Penelitian dilaksanakan bulan November 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

3.1.2. Sasaran Penelitian

Sasaran Penelitian adalah LMDH, Instansi atau Dinas Terkait, Pengusaha dan perseorangan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan *agroforestry*. Sasaran penelitian dikategorikan sebagai responden. Responden bersifat multi pihak sebagai sumber data primer, yang terdiri-dari laki-laki maupun perempuan dan berbagai strata sosial. Adapun besaran sampel yang

diambil, ukuran (*sample fraction*) yang dapat diterima tergantung pada jenis penelitian. Ukuran minimum untuk penelitian deskriptif adalah 10 % dari populasi. Beberapa responden dan sebagian data/informasi yang diperlukan untuk mendukung materi pokok kajian adalah sebagai berikut.

1) Masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan *agroforestry* di kawasan hutan (anggota LMDH) terdiri dari beberapa kelompok strata sosial golongan. Karena itu, responden perlu diambil secara *purposive* pada masing-masing strata golongan. Responden yang dipilih adalah anggota masyarakat yang dapat berkomunikasi dan mampu menjelaskan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan agribisnis. Informasi yang diperlukan adalah: partisipasi, persepsi, harapan-harapan masyarakat, aktivitas fisik, pendapatan, hak dan kewajiban dalam kegiatan *agroforestry*. Pengambilan sampel di setiap LMDH sebesar 10% dari anggota yang ada.

2) Dinas terkait

Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian beserta UPTD nya merupakan dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan *agroforestry* di Wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang. Informasi yang diperlukan adalah peran dan kewenangan, perangkat hukum yang mendasari pelaksanaan peran dan kewenangan, masalah yang dihadapi dalam melaksanakan peran dan kewenangan, solusi yang telah digunakan dalam menyelesaikan masalah, prosedur pelaksanaan peran dan kewenangan.

3) Perhutani / KPH

Perhutani merupakan institusi yang berkepentingan dengan kegiatan *agroforestry*. Informasi yang diperlukan adalah dasar hukum pengelolaan hutan, perkembangan hasil pengelolaan, pengalaman pengelolaan yang mendasari

pentingnya sistem PHBM, peran, kewenangan, hak dan kewajiban serta prosedur pelaksanaan peran dan kewenangan dalam kegiatan *agroforestry*.

4) Investor/pengusaha

Pengusaha atau investor yang berkepentingan dengan kegiatan *agroforestry* termasuk penanaman modalnya di BKPH Tanggung KPH Semarang adalah PT Indo Fatah Rizki Mulia. Informasi yang diperlukan adalah latar belakang keterlibatan dengan agribisnis di kawasan hutan (*agroforestry*), persepsi maupun tujuan kegiatan.

3.2. Data dan Informasi yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kegiatan *agroforestry* di BKPH tanggung KPH Semarang.
- b. Data pendapatan masyarakat dari hasil usaha tani yang dilakukan di kawasan hutan BKPH Tanggung KPH Semarang.
- c. Data peran, tugas, aturan dan struktur kelembagaan meliputi : partisipasi dan persepsi pihak terlibat, kewenangan pihak terlibat, hak dan kewajiban, intensitas pencurian dan konflik kawasan, stabilitas produksi dan usaha-usaha rehabilitasi.
- d. Data SWOT untuk strategi pengembangan
- e. Data lainnya yang diambil dari LMDH, KPH instansi terkait dan investor/pengusaha, di antaranya meliputi : petak-petak yang dilaksanakan kegiatan *agroforestry*, realisasi kegiatan tanaman palawija, program kegiatan instansi terkait kegiatan *agroforestry* dan bukti legalitas lembaga terkait kegiatan *agroforestry*.

Data diambil secara langsung di lapangan baik melalui metode observasi, wawancara langsung maupun bantuan instrumen kuesioner. Metode observasi merupakan pengamatan langsung untuk melihat fakta di lapangan guna mendukung hasil wawancara dan atau kuesioner.

Data yang didapat, selain untuk kepentingan analisis indikator, digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara indikator sehingga kajian ini mempunyai kedalaman penelitian *explanatory* (penelitian penjelasan).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode :

- a. Metode wawancara dengan instrumen panduan wawancara (*interview guide*) yang khusus dirancang untuk merekam berbagai jenis data primer seperti disebutkan sebelumnya.
- b. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang dimiliki sumber data sekunder atau instansi pemerintah terkait.
- c. Metode observasi yakni melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi internal dan eksternal kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan *agroforestry*.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Sebelum proses analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh untuk mengorganisasikan data agar dapat dibaca dan ditafsirkan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Editing*, dilakukan untuk mengecek kembali data, baik dari jawaban narasumber maupun data sekunder

- b. *Coding*, dilakukan dengan memberi nilai atau skor untuk jawaban-jawaban responden
- c. *Tabulating*, dilakukan untuk data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dengan menyusun dan mengelompokkan data dalam tabel berdasarkan klasifikasi yang sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisa lebih lanjut.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

- a. Analisis pendapatan dilakukan pada pelaksanaan kegiatan *agroforestry* yang berkaitan dengan pendapatan petani hutan/pesanggem.

Untuk pendapatan yang diperoleh dalam usaha tani di lahan hutan di hitung dengan rumus (Soekartawi, 2006) :

$$Pp = R - C$$

Keterangan :

Pp = Pendapatan pesanggem

R = Penerimaan

C = Biaya Total

Untuk melihat *return* usaha tani dianalisis dengan menggunakan analisis R/C (*cost ratio*), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$a = R/C \text{ (Cost Ratio)}$$

$$R = Py \cdot Y$$

$$C = FC + VC$$

Keterangan :

R = Penerimaan

C = Biaya

Py = Harga output

Y = Output

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel

Apabila : $R/C = 1 \rightarrow$ usaha tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1 \rightarrow$ usaha tidak layak

$R/C > 1 \rightarrow$ usaha layak

- b. Analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik wilayah penelitian, karakteristik responden, karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Analisa deskriptif juga dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kelembagaan untuk mengkaji efektifitas struktur, mekanisme dan kinerja lembaga yang terlibat langsung dalam kegiatan *agroforestry*. Kunci kelembagaan yang efektif terletak pada kepentingan bersama para pihak terhadap pengelolaan kegiatan *agroforestry*. Dengan kepentingan bersama ini, maka secara otomatis akan ditemukan titik temu kepentingan.

Untuk melihat keberhasilan upaya rehabilitasi lahan, dilakukan penilaian berdasarkan persentase tumbuh tanaman di kawasan hutan. Kriteria persentase tumbuh tanaman pokok dibagi menjadi 5 (lima) kriteria dan klasifikasi sesuai dengan Tabel 2 berikut ini (Rumekso, 2005) :

Tabel 2. Kriteria Persentase Tumbuh Tanaman Pokok dan Pengisi

Persen Tumbuh (%)	Kriteria	Klasifikasi
90 – 100	A	Amat baik
75 – 89	B	Baik
50 – 74	C	Cukup
30 – 49	D	Kurang
≤ 29	E	Jelek (Gagal)

Sumber : Rumekso, 2005

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kegiatan *agroforestry* di wilayah BKPH Tanggung KPH Semarang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Analisis situasi Internal dan Eksternal

Analisis situasi internal-eksternal : mengidentifikasi situasi internal berupa faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi pengembangan kelembagaan di BKPH Tanggung KPH Semarang. Identifikasi ini merupakan basis informasi untuk analisis SWOT dengan tahapan sebagai berikut.

- a) Dibuat daftar kekuatan internal
- b) Dibuat data kelemahan internal
- c) Dibuat daftar peluang eksternal
- d) Dibuat daftar ancaman eksternal bagi pengembangan kelembagaan di BKPH Tanggung KPH Semarang.

2) Analisis Matriks SWOT

Mengacu Rangkuti (2009), tahapan dalam merumuskan strategi pengembangan kelembagaan melalui matriks SWOT adalah sebagai berikut.

- a. Disusun peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan pada kolom 1.
- b. Tiap-tiap faktor kemudian diberi bobot pada kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
- c. Tiap-tiap faktor dihitung rating-nya (pada kolom 3) dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi kegiatan.
- d. Bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 dikalikan untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
- e. Dilakukan penjumlahan skor pembobotan (pada kolom 4) untuk tiap-tiap faktor.
- f. Dilakukan pengurangan antara jumlah total faktor kekuatan dengan faktor kelemahan, selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X.
- g. Dilakukan pengurangan antara jumlah total faktor peluang dengan ancaman, selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y.
- h. Posisi usaha atau kegiatan ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

3.6. Batasan Pengertian dan Satuan Pengukuran

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dibuat batasan pengertian sebagai berikut.

- a. Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan (Perum Perhutani, 2009).
- b. Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya (Perum Perhutani, 2009).
- c. Kelompok Tani Hutan adalah perkumpulan orang-orang (petani) yang tinggal di sekitar hutan, untuk menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial-ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan ikut serta melestarikan hutan dengan prinsip kerja dari – oleh – dan untuk anggota (Perum Perhutani, 2009).
- d. Petani hutan (pesanggem) adalah anggota kelompok tani hutan yang menggarap lahan hutan (Perum Perhutani, 2009).
- e. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan (Perum Perhutani, 2009).
- f. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) merupakan satuan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan dipimpin oleh seorang Asper (Assisten Perhutani) dibantu oleh KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) dan mandor
- g. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Departemen Kehutanan, 2009).

- h. Penghasilan atau penerimaan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal, meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Penghasilan meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal maupun yang berasal dari luar operasi normalnya, dalam satuan rupiah (Ikatan Akuntan Indonesia, 1996).
- i. Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu usaha selama satu periode, dalam satuan rupiah (Tarigan, 2005).
- j. Keuntungan (*gains*) mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 1996).
- k. Biaya adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang/jasa, dalam satuan rupiah (Ikatan Akuntan Indonesia, 1996).
- l. Profit adalah keuntungan yang diterima karena penjualan sejumlah satuan output, dalam satuan rupiah (Ikatan Akuntan Indonesia, 1996).